

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KOMPETENSI PENDAMPING DESA TERHADAP PENERAPAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng)

Luh Novi Bamyanti¹, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali

e-mail: luhnovibamyanti09@undiksha.ac.id¹, ayu.wulan@undiksha.ac.id²

Abstak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, Komitmen organisasi, dan kompetensi pendamping desa terhadap penerapan *good village governance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu Perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara pada desa di Kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode probabily sampling yaitu *proportional random sampling*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer menggunakan kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan program *statistical Package for Social Science (SPSS) v.20*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) gaya kepemimpinan berpegaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good village governace*; (2) komitmen organisasi berpegaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good village governace*; dan (3) kompetensi pendamping desa berpegaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good village governace*.

Kata Kunci: gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kompetensi pendamping desa, dan *good village governace*.

Abstract

This study aims to determine the effect of leadership style, organizational commitment, and competence of village assistants on the implementation of good village governance. This type of research is quantitative research. The population used is the village apparatus, namely the village head, secretary, and treasurer in villages in Buleleng Regency. The sampling technique used in this study was the probability sampling method, namely proportional random sampling. The source of the data used is primary data using a questionnaire which is measured using a Likert scale. Analysis of the data used in this study using descriptive analysis, data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing using the statistical Package for Social Science (SPSS) v.20 programs. The results of the study show that (1) leadership style has a positive and significant effect on the implementation of good village governance; (2) organizational commitment has a positive and significant impact on the implementation of good village governance; and (3) the competence of village facilitators has a positive and significant impact on the implementation of good village governance.

Keywords: *leadership style, organizational commitment, the competence of village assistants, and good village governance*

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu bagian dari unit organisasi pemerintahan daerah yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sama halnya seperti pemerintahan yang lain, pemerintahan di tingkat desa juga perlu adanya upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). *Good village governance* merupakan penerapan prinsip-prinsip dasar *good governance* di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dimana *good governance* merupakan konsep pendekatan yang berorientasi terhadap pembangunan di sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengarahkan terhadap upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga menimbulkan kinerja yang lebih baik. Dalam mengimplementasikan *good village governance*, terdapat tiga elemen yang saling berkaitan satu sama lain yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Helmayani, 2018). Transparansi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diperlukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Transparansi juga diperlukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan dengan member masukan, dukungan serta control terhadap jalannya pemerintahan pada lingkup desa. Dengan adanya tiga pilar tersebut dan pemerintah desa mampu menjalankannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) akan terwujud.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, setiap desa mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa dapat digunakan sebagai biaya program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) di setiap tahunnya. Dana Desa diperuntukan untuk membiayai empat program prioritas yakni *One village one product*, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), embung desa, dan sarana olahraga. Keempat program prioritas tersebut disusun agar menjadi daya ungkit peningkatan perekonomian perdesaan. Menurut kemendes PDPT, Bumdes menjadi salah satu program prioritas, karena melalui BUMDes masyarakat mampu mengelola ekonomi secara otonom yang bertujuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya. Program dana desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 memberikan dampak yang besar bagi desa dalam pengentasan desa tertinggal menjadi berkembang serta desa yang telah berkembang menjadi desa yang mandiri (Maharani, 2019). Sehingga, dana desa yang diterima setiap desa harus dikelola dengan baik oleh aparat desa agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Dalam pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, maka perlu memegang teguh prinsip-prinsip dari *good governance* (Safitri dan Rigel, 2018). Akan tetapi kasus-kasus yang terjadi dilapangan memberikan pandangan bahwa masih banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan dana desa, dimana dengan adanya kasus penyalahgunaan dana desa ini akan menyebabkan terhambatnya pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti kasus yang terjadi di Desa Suwug, dimana dalam kasus ini, Kelian Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Buleleng diduga tidak transparan

dalam pengelolaan pembangunan balai banjir, sehingga masyarakat mempertanyakan pertanggungjawaban dana pembangunan balai banjir yang bersumber dari dana ADD sebesar Rp 40 juta dan sumbangan dari desa adat dan desa dinas sebesar Rp 15 juta (*sumber: balieditor.com,2019*). Kasus lain seperti yang dikutip pada Radar Bali (2020) yaitu adanya dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar pada tahun 2019 dan juga terdapat laporan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa pada proyek pengerjaan fisik penyederan jalan dan pengerjaan bak penampungan air minum bagi masyarakat desa yang dikeluarkan dari APBDes tahun 2019. Selain itu kasus lain mengenai penyalahgunaan dana desa yaitu kasus yang terjadi di desa Temukus tahun 2020 yaitu adanya penyalahgunaan anggaran dana program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Bali Mandara.

Teori dasar yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Donaldson dan davis (1991) menjelaskan teori *stewardship* merupakan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* lebih cocok digunakan dalam penelitian ini karena Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan juga harus bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan rakyat, memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan LKPD yang baik serta harus memiliki kesadaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Organisasi yang baik tentunya dipimpin oleh pemimpin yang baik pula. Pemimpin memegang peran penting dalam tercapainya organisasi yang baik, karena pemimpin yang baik pasti akan dengan mudah berinteraksi dengan seluruh orang yang berada dalam ruang lingkup organisasi tersebut. Menurut Thoah (2013) menjelaskan bahwa gaya

kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar hendak melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang diharapkan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sehingga semakin baik kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan arahan kepada bawahannya sehingga akan berpengaruh kepada tindakan bawahannya. Hasil penelitian Wardani (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara gaya kepemimpinan terhadap implementasi *good village governance* di Kabupaten Buleleng. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh rahmah (2018) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan *good corporate governance*. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_1 : *Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan good village governance.*

Komitmen organisasi merupakan sejauh mana seorang pegawai atau karyawan mampu mengikatkan dirinya ke dalam satu organisasi tertentu dan tujuan organisasi, serta berharap untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut dan kekuatan, relatif identifikasi individu terhadap organisasinya. Komitmen organisasi dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (Robbins, 2008). Hasil penelitian Sari (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara komitmen organisasi terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian Apriwijaya (2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* pada Pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan good village governance.

Dalam implementasi UU desa, pendamping desa sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan membina perangkat desa dalam segala pekerjaan teknis yang ada di desa. Kompetensi pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap pemerintahan desa, menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk membangun kawasan pedesaan secara partisipatif dan meningkatkan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri (Maharani, 2019). Seperti yang dijelaskan Pratama (2017) yang menyatakan bahwa kinerja pendamping desa dengan melakukan pendekatan-pendekatan sosial seperti lebih sering berkomunikasi dengan desa dan masyarakatnya serta bertatap muka langsung sehingga akan terjalin ikatan yang baik, dan lain sebagainya berpengaruh terhadap upaya membangun kemandirian desa. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : kompetensi pendamping desa berpengaruh positif terhadap penerapan good village governance.

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pada pemaparan diatas adalah: pertama untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap penerapan *good village governance*, kedua untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan *good village governance*, ketiga untuk mengetahui pengaruh kompetensi pendamping desa terhadap penerapan *good village governance*.

METODE

Jenis data yang digunakan pada penelitian yaitu menggunakan data kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian dianalisis (Suharsaputra, 2012). Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala *likert*. Sejumlah 387 perangkat desa di Kabupaten Buleleng yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Benahara Desa dipilih sebagai populasi penelitian. Sampel diambil melalui metode *probability sampling* khususnya *proportional random sampling* dimana seluruh unsur populasi berkesempatan sama dalam memilih secara acak serta pengambilannya dilakukan dengan proporsional. Secara keseluruhan responden berjumlah 294 orang, sehingga jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 294 kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinierita, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda, uji pasial (uji t), dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini meliputi uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai minimal, maksimal, rata-rata dan standar deviasi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dari 294 responden, Variabel gaya kepemimpinan menunjukkan skor minimum 66 dan skor maksimum 95. Skor rata-rata 77,19 dengan standar deviasi sebesar 4,149. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil dari pada skor rata-rata yang berarti bahwa penyebaran data gaya kepemimpinan pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh/tinggi. Variabel komitmen

organisasi menunjukkan skor minimum 16 dan skor maksimum 25. Skor rata-rata 20,70 dengan standar deviasi sebesar 1,883. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil dari pada skor rata-rata yang berarti bahwa penyebaran data komitmen organisasi pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh/tinggi. Variabel kompetensi pendamping desa menunjukkan skor minimum 52 dan skor maksimum 70. Skor rata-rata 63,20 dengan standar deviasi sebesar 5,000. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil dari pada skor rata-rata yang berarti bahwa penyebaran data kompetensi pendamping desa pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh/tinggi. Variabel *good village governance* menunjukkan skor minimum 40 dan skor maksimum 65. Skor rata-rata 50,10 dengan standar deviasi sebesar 3,560. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil dari pada skor

rata-rata yang berarti bahwa penyebaran data *good village governance* pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh/tinggi.

Hasil uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji validitas, valid atau tidaknya suatu kuesioner dapat diukur dengan melihat *Pearson Correlation*. Apabila korelasi diantara skor masing-masing pernyataan terhadap skor total signifikan ($Sig(2-tailed) > 0,05$). Berdasarkan uji validitas pada penelitian ini semua nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa diputuskan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Pada hasil uji reliabilitas Alpha Cronbach memiliki nilai lebih besar dari 0,600. Artinya seluruh variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi syarat. Karena uji validitas dan uji reliabilitas terpenuhi maka instrument ini layak digunakan. Setelah uji kualitas data terpenuhi, maka dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolenieritas.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		294
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.06260067
Most Extreme Differences	Absolute	.037
	Positive	.037
	Negative	-.020
Kolmogorov-Smirnov Z		.633
Asymp. Sig. (2-tailed)		.817

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) berada diatas 0,05. Melihat dari hasil uji normalitas pada tabel diatas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,817, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Pengujian selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk

mengetahui model regresi yang baik adalah tidak terbebas dari heterokedastisitas atau merupakan homokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan uji Glejser. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak karena terdapat heteroskedastisitas, sedangkan apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0

diterima berarti terbebas dari heteroskedastisitas

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1.379	2.165		.637
Gaya Kepemimpinan	.006	.031	.012	.183	.855
Komitmen Organisasi	-.079	.063	-.079	-1.258	.210
Kompetensi Pendamping Desa	.035	.025	.094	1.430	.154

a. Dependent Variable: Abs_RES

Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa nilai Sig. pada variabel gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kompetensi pendamping desa lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Pengujian selanjutnya yaitu uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antarvariabel independen. Dalam model

regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF < 10 dan mempunyai nilai *tolerance* > dari 0,1. Hasil Uji multikolinieritas menunjukkan jika nilai *tolerance* variabel gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kompetensi pendamping desa lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF berada dibawah 10. Kesimpulannya tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	16.369	3.542		4.621	.000	
Gaya Kepemimpinan	.187	.050	.218	3.720	.000	.743	1.345
Komitmen Organisasi	.377	.103	.199	3.662	.000	.860	1.163
Kompetensi Pendamping Desa	.182	.040	.255	4.492	.000	.790	1.267

a. Dependent Variable: Good Village Governance

Sumber: output SPSS for Windows V. 20

Setelah uji asumsi klasik, maka selanjutnya yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), dan uji koefisien determinasi.

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda dan Uji T

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.369	3.542		4.621	.000
Gaya Kepemimpinan	.187	.050	.218	3.720	.000
Komitmen Organisasi	.377	.103	.199	3.662	.000
Kompetensi Pendamping Desa	.182	.040	.255	4.492	.000

a. Dependent Variable: Good Village Governance

Sumber: output SPSS for Windows V. 20

Berdasarkan tabel 4.10 maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 16,369 + 0,187X_1 + 0,377X_2 + 0,182X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Dari persamaan tersebut, maka diketahui nilai konstanta 16,369 menunjukkan bahwa variabel Gaya kepemimpinan (X₁), Komitmen organisasi (X₂), dan Kompetensi pendamping desa (X₃) bernilai konstan, maka variabel *good village governance* (Y) memiliki nilai 16,369 satuan. Nilai koefisien regresi gaya kepemimpinan (X₁) sebesar 0.187 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X₁ sebanyak 1 satuan, maka *good village governance* akan bertambah 0,187 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Nilai koefisien regresi komitmen organisasi (X₂) sebesar 0.377 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X₂ sebanyak 1 satuan, maka *good village governance* akan bertambah 0,377 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Nilai koefisien kompetensi pendamping desa (X₃) sebesar 0.182 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X₃ sebanyak 1 satuan, maka *good village governance* akan bertambah 0,182 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Berikutnya yaitu uji parsial (uji t) yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh secara individu dari variabel independen terhadap variable dependen. Berdasarkan pada tabel hasil uji analisis regresi berganda dan uji t maka dapat dilihat bahwa pada gaya kepemimpinan memiliki hasil uji t menyatakan nilai Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan (X₁) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y) Jadi pada kesimpulannya hasil uji t variabel gaya kepemimpinan mendukung hipotesis yang diajukan, maka H₁ diterima.

Pada variabel komitmen organisasi hasil uji t menyatakan nilai Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi (X₂) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y) Jadi pada kesimpulannya hasil uji t variabel komitmen organisasi mendukung hipotesis yang diajukan, maka H₂ diterima.

Pada variabel kompetensi pendamping desa hasil uji t menyatakan nilai Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi pendamping desa (X₃) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y) Jadi pada kesimpulannya hasil uji t variabel kompetensi pendamping desa mendukung hipotesis yang diajukan, maka H₃ diterima.

Pengujian selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variable dependen.

Tabel 5 Hasil Uji Determinasi R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.510 ^a	.260	.252	3.078

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pendamping Desa, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan

Sumber: output SPSS for Windows V. 20

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,252. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 25.2% *good village governance* dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kompetensi pendamping desa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *good village governance*

Hasil yang didapat dari pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *good village governance* menunjukkan nilai koefisien regresi 0,187 dengan nilai Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y) Jadi pada kesimpulannya hasil uji t variabel gaya kepemimpinan mendukung hipotesis yang diajukan, maka H_1 diterima.

Keberhasilan penerapan *good governance* tidak dapat tercapai tanpa dukungan gaya kepemimpinan yang jelas dalam organisasi. Pemimpin memegang peran penting dalam tercapainya organisasi yang baik, karena pemimpin yang baik pasti akan dengan mudah berinteraksi dengan seluruh orang yang berada dalam ruang lingkup organisasi tersebut. Menurut Thona(2013) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar hendak melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang diharapkan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sehingga semakin baik kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan arahan kepada bawahannya sehingga akan berpengaruh kepada tindakan bawahannya. Sejalan dengan Teori *stewardship*, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Village Governance*) didukung dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik, sebab pemimpin suatu organisasi memiliki peran besar dalam mempengaruhi bawahannya. Sehingga semakin baik gaya kepemimpinan yang dimiliki maka

semakin meningkat pula penerapan *good village governance*. Dalam terwujudnya *good village governance*, seorang pemimpin harus mampu bersikap objektif dengan menghargai gagasan bawahan dalam menjalani profesi, mampu membangun kerjasama diantara atasan dan bawahan, mampu mengambil keputusan yang sesuai, serta mampu mengarahkan rekan kerja sesuai dengan tupoksinya. Kepemimpinan pemimpin yang diperlihatkan dan diterapkan ke dalam suatu gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan *good village governance*, karena pada dasarnya sebagai tulang punggung pengembangan organisasi dalam mendorong, dan mempengaruhi semangat masyarakat. Untuk itu pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam penerapannya. Jadi dengan penerapan gaya kepemimpinan yang tepat, dengan menyatukan tujuan organisasi dengan tujuan individu, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Penerapan gaya kepemimpinan pada pegawai pemerintahan pada setiap desa di Kabupaten Buleleng dinyatakan baik untuk menunjang *good village governance*. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab sangat setuju di setiap indikator pada variabel ini. Jawaban responden menghasilkan nilai persentase terbesar adalah pada indikator kelima yaitu pencapaian tujuan sebesar 89,6% responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini berarti pegawai pemerintahan pada setiap desa di Kabupaten Buleleng merasa setuju bahwa pencapaian tujuan organisasi dapat membantu menciptakan *good village governance*. Adapun indikator keempat yakni pembagian tugas menghasilkan persentase yang tidak begitu besar yaitu 72% dari jawaban setuju dan sangat setuju oleh responden. Hal ini berarti bahwa kepala desa merasa kurang mampu dalam pembagian tugas saat bekerja.

Menurut Nasir (2019) mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan mampu memberikan dorongan pada penerapan *good governance*, keberhasilan *good governance* terletak pada kepemimpinan yang kuat, tangguh dan mempunyai daya tahan untuk berkeadilan organisasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai gaya kepemimpinan yang baik maka cenderung mengatur bawahannya dan organisasinya sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Adanya gaya kepemimpinan yang baik akan mampu membawa rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Wardani (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara gaya kepemimpinan terhadap implementasi *good village governance* di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya penelitian dari Mewengkang, (2018) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mampu mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan. Sedangkan penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh rahmah (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan *good corporate governance*.

Pengaruh komitmen organisasi terhadap good village governance

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap *good village governance* menunjukkan nilai koefisien regresi 0,377 dengan nilai Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y) Jadi pada kesimpulannya hasil uji t variabel komitmen organisasi mendukung hipotesis yang diajukan, maka H_2 diterima.

Menurut (Robbins, 2008) komitmen organisasi merupakan komponen dari perilaku. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat

memelihara keanggotaannya itu. Keterlibatan seseorang yang tinggi dalam suatu pekerjaan berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Komitmen organisasi dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (Robbins, 2008). Sejalan dengan teori Stewardship dimana pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi akan bekerja melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Maka dari itu, pentingnya komitmen organisasi itu ditanamkan pada setiap pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan/instansi. Dengan terciptanya komitmen organisasi yang baik, maka faktor yang menjadi pendukung yakni disiplin. Satu hal yang harus diperhatikan bersama, faktor Sumber daya manusia merupakan elemen yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan produktif. Jadi, manusia dapat dipandang sebagai faktor penentu, karena di tangan manusialah segala inovasi akan direalisasikan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.

Komitmen organisasi pada pegawai pemerintahan pada setiap desa di Kabupaten Buleleng dinyatakan baik untuk menunjang terciptanya *good village governance*. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab sangat setuju di setiap indikator pada variabel ini. Jawaban responden menghasilkan nilai persentase terbesar adalah pada indikator ketiga yaitu adanya perasaan yang muncul dari pegawai untuk saling menjaga dan memajukan perusahaan sebesar 89,4% jawaban sangat setuju dan setuju. Hal ini berarti pegawai pemerintahan pada setiap desa di Kabupaten Buleleng merasa memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi pada instansi ini dapat menunjang terwujudnya *good village governance*. Adapun indikator pertama menghasilkan persentase yang tidak begitu besar yaitu Kesanggupan dari karyawan untuk selalu berusaha mematuhi peraturan 77% untuk jawaban sangat setuju dan setuju. Hal ini berarti

pegawai pemerintahan pada setiap desa di Kabupaten Buleleng kurang memiliki kesanggupan untuk selalu berusaha mematuhi peraturan.

Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik, dengan begitu maka pemerintah daerah akan menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan penerapan Good Village Governance di daerahnya. Dengan adanya komitmen organisasi yang kuat akan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja dari para pegawai sehingga visi dan misi pemerintah akan mudah tercapai. Visi dan misi pemerintah yang tercapai maka akan berdampak terhadap penilaian tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sari (2017) dan Apriwijaya (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara komitmen organisasi terhadap penerapan good governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengaruh kompetensi pendamping desa terhadap good village governance

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh kompetensi pendamping desa terhadap *good village governance* menunjukkan nilai koefisien regresi 0,182 dengan nilai Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi pendamping desa (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y) Jadi pada kesimpulannya hasil uji t variabel kompetensi pendamping desa mendukung hipotesis yang diajukan, maka H_3 diterima.

Pendamping desa sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan membina perangkat desa dalam segala pekerjaan teknis yang ada di desa. Kompetensi pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap pemerintahan desa, menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk membangun kawasan pedesaan secara partisipatif dan meningkatkan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga

ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri (Maharani, 2019). Sejalan dengan teori stewardship dengan adanya pendamping desa mampu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang ada sehingga tujuan dari pemerintah desa dapat terwujud. Kemampuan yang dimiliki pendamping desa untuk mewujudkan *good village governance* yaitu bisa dengan adanya memiliki pengalaman pengorganisasian di desa, mampu mendampingi masyarakat dalam hal meningkatkan kreatifitas dan inovasi di desa, memiliki pandangan kedepan dan mampu menganalisis potensi desa untuk di kembangkan usaha ekonomi di desa, serta pendamping desa mampu mengembangkan kemampuan IT perangkat desa. Pendamping desa diperlukan agar bisa mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Kerja pendamping desa difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Hal ini dilakukan guna meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.

Kompetensi pendamping desa pada pegawai pemerintahan pada setiap desa di Kabupaten Buleleng dinyatakan baik untuk menunjang terciptanya *good village governance*. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab sangat setuju di setiap indikator pada variabel ini. Jawaban responden menghasilkan nilai persentase terbesar adalah pada indikator pertama yaitu 91% untuk jawaban sangat setuju dan setuju. Hal ini berarti pegawai pemerintahan pada setiap desa di Kabupaten Buleleng merasa setuju bahwa adanya pendamping yang baik mampu membantu terciptanya

good village governance. Adapun indikator yang memiliki presentase paling kecil yakni indikator kedua sebesar 89,7% untuk jawaban sangat setuju dan setuju. Hal ini berarti bahwa aparat desa masih sedikit ragu mengenai pengalaman yang pendamping desa miliki.

Menurut Moehariono (2009) kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar yang memperlihatkan cara pikir, bersikap dan bertindak, dan menarik kesimpulan yang mampu dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode tertentu. Pendamping desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, kegiatan pendampingan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Maharani (2019) kompetensi pendamping desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan Pratama (2017) yang menyatakan bahwa kinerja pendamping desa berpengaruh terhadap upaya membangun kemandirian desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Gaya kepemimpinan memiliki nilai koefisien 0,187 dan Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y). Artinya individu dengan gaya kepemimpinan yang baik akan cenderung berpotensi besar menciptakan *good village governance* yang baik. Komitmen organisasi memiliki nilai koefisien 0,377 dan Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih

kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y) Artinya dengan memiliki komitmen organisasi yang cukup maka membuat visi dan misi organisasi berjalan dengan lancar. Kompetensi pendamping desa memiliki nilai koefisien 0,182 dan Sig. sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi pendamping desa (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap *good village governance* (Y). Artinya dengan kompetensi pendamping desa yang memiliki cukup pemahaman akan memberikan dampak baik bagi kelangsungan program-program di desa.

Saran dari penelitian ini yang pertama bagi pemerintah desa kabupaten buleleng yaitu diharapkan agar pemimpin desa dapat memaksimalkan gaya kepemimpinannya dari segi pembagian tugasnya agar mampu memberikan arahan yang benar dalam mengerjakan tugas sehingga aparat desa yang lain lebih yakin terhadap pembagian tugas saat bekerja. Melalui penelitian ini diharapkan agar desa mampu memberikan sanksi yang tegas terhadap aparatur desa, sehingga nantinya aparat desa lebih taat terhadap aturan-aturan yang ada sehingga nanti pencapaian *good village governance* dapat terwujud dengan maksimal. Melalui penelitian ini diharapkan agar pendamping desa lebih memiliki pengalaman yang baik dalam mendampingi desa, minimal pengalaman dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Saran Kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian ataupun menggunakan lokasi yang berbeda, menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti wawancara dan observasi dan menambah variabel independent agar koefisien determinasi pada penelitian selanjutnya dapat meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya 25,2% variabel gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kompetensi pendamping desa mampu mempengaruhi *good village governance*. Penelitian ini hanya mengkaji dari faktor organisasionalnya saja, peneliti

selanjutnya dapat mengkaji dari perspektif lain, seperti misalnya faktor individual seperti karakteristik aparatur desanya atau faktor teknisnya seperti sistem informasi yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriwijaya, M. Arif. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Palembang). *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya
- Bali Editor. 2019. "Warga Desa Suwug Kajian *Ngelurug Kelian* Banjar Dinas". Tersedia di <https://balieditor.com>. (diakses pada tanggal 10 Februari 2021).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Helmayani, Putu Lia. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Badan Permusyawaratan Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi *Good Village Governance* (Studi pada Desa di Kabupaten Buleleng). *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Maharani, Ida Ayu Eka Putri . 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nurhazizal, dkk. 2019. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi SDM terhadap Kinerja Pemerintah Desa: *Good Governance* sebagai Pemediasi. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 1
- Pratama. 2017. *Analisis Kinerja Pendamping Desa dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Radarbali.2020. *Korupsi di Buleleng Menumpuk, Respons Polisi Lambat, Ini Pemicunya*.diakses dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/07/08/203066/korupsi-di-buleleng-menumpuk-respons-polisi-lambat-ini-pemicunya>. pada tanggal 10 Februari 2021.
- Rahmah, Elok Khikmawati. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi pada PT Bank Tabungan Negara KC Yogyakarta). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi, Sekola Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Keluarga Pahlwan Negara Yogyakarta.
- Robbins. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, Teti Anggita, dan Rigel Nurul Fathah. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol: 2 No:1
- Sari, Weni Nirmala. 2017. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (Spip) dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 13 No : 03 Tahun 2022

Thoha, Miftah, 2013, kepemimpinan dalam manajemen, edisi 1, Jakarta,PT RajaGrafindo.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 5495. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wardani, Putu Listia Ika. 2019. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Buleleng).*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, vol: 10 No:3